KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA NAVIGASI INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN BENTUK
BADAN USAHA MILIK NEGARA
AGUS HERLAMBANG, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Apeldorn, van, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ketiga puluh.

Soekanto,Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia.

Sumardjono, Maria SW, 2007, *Bahan Kulia Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Buergental, Thomas, 1969, Law-Making In The International Civil Aviation Organitation, First Edition, Syracuse University Press.

Muljono, Eugenia Liliwati, 1999, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara*, Buku I, Harvarindo Purwosutjipto, H.M.N, 1999, Pengertian Hukum Dagang I, Djembatan, Jakarta.

Annex 11 to The convention of International Civil Aviation:*Air Traffic Services, Thirteenth edition, July 2001*.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroaan (PERSERO) Angkasa Pura II.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA NAVIGASI INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN BENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA
AGUS HERLAMBANG, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,M.S
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pelayanan dan Keamanan Keselamatan Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Bandara Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 23 Tahun 1996 tentang Tarif Jasa

Pelayanan Penerbangan (JP2) Untuk enerbangan International.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Jasa Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum.

Anggaran Dasar PT (Persero) Angkasa Pura II

Angkasa Pura II, *Statistik Angkutan Udara Tahun 2009.*